

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk 3,51 persen dari total penduduk dunia dan merupakan negara kepulauan terbesar keempat di Asia Tenggara. serta salah satu negara berkembang yang dilanda kemiskinan. Seperti diketahui, bahwa Indonesia didapati beraneka macam persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, masalah lingkungan, dan masalah sosial lainnya hadir di Indonesia saat ini. Persoalan tersebut ada karena kondisi masyarakat tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut masih menjadi bagian dari fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang yaitu kemiskinan, termasuk Indonesia.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya mengentaskan kemiskinan bagi warganya. Salah satu langkah penting untuk mendukung mitigasi kemiskinan adalah melalui penerbitan strategi pemerintah melalui penerbitan perundang-undangan yang kemudian dimasukkan dalam program pengentasan kemiskinan<sup>1</sup>.

Kemiskinan adalah sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan taraf hidup daerah tertentu atau menikmati kemakmuran ekonomi karena ketidakpunyaan harta. Kemiskinan merupakan isu penting yang sering menjadi perhatian setiap bangsa sehingga hal tersebut perlu mendapat kepedulian pemerintah di negara manapun. Istilah kemiskinan muncul sebab seseorang tidak dapat memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi yang ditentukan dengan kebutuhan dasar dari standar hidup tertentu<sup>2</sup>. Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan untuk mengatasi kebutuhan dasar yang menyebabkan berbagai masalah tentang kesejahteraan. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang rumit dan kompleks. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pemerintah untuk mencari suatu kebijakan untuk menekan tingkat kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Murdiyana dan Mulyana, "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Politik Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 74.

<sup>2</sup> Ardi Adji et al., "Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan," *Tnp2K*, 2020, 5.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar) Dalam mengukur kemiskinan. Menurut pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan berdasarkan pengukuran dari sisi pengeluaran sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok dan kebutuhan bukan makanan. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 terdapat 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dibandingkan maret 2020. Tahun 2021 jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, terjadi penurunan 1,04 juta jiwa pada maret 2020 dan menurun 1,05 juta jiwa pada September 2020. Jumlah penduduk miskin pada september 2020 sebesar 26,36 juta jiwa, meningkat 0,20 juta jiwa dibanding maret 2022 dan turun 0,14 juta orang dibandingkan September 2021<sup>3</sup>. Berdasarkan data tersebut menunjukkan tren yang fluktuatif sehingga diperlukan kebijakan dan program-program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Kemudian lagi, pengangguran adalah salah satu alasan kemiskinan. Pendapatan merupakan masalah akut bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makan, air dan tempat tinggal yang harus diperjuangkan setiap hari oleh pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil pendapatan<sup>4</sup>. Agar kemiskinan tidak semakin parah, pemerintah fokus terhadap kemiskinan agar tidak semakin parah. Menurut beberapa ahli, menciptakan kegiatan ekonomi merupakan cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan<sup>5</sup>.

Bagian dari harta yang harus diberikan oleh wajib zakat (Muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahik) merupakan pengertian dari zakat. Jika harta yang memenuhi syarat wajib zakat seperti batas minimum atau nisab dan haul terpenuhi maka wajib menunaikan zakat. Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong

---

<sup>3</sup> BPS “Berita Resmi Statistik 2020-2022”

<sup>4</sup> Dhani Kurniawan, “Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya,” *Gema Eksos* 5, no. 1 (2011): 3.

<sup>5</sup> Noor Zuhdiyaty and David Kaluge, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir,” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (2018): 28, <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>.

pembangunan ekonomi karena Fungsi strategis zakat adalah untuk memastikan kekayaan dinikmati oleh semua orang, bukan hanya orang kaya<sup>6</sup>.

Menurut bahasa Arab, kata infak berasal dari kata kerja *anfaqa* yang berarti membelanjakan, memberi, atau membelanjakan harta. Dalam konteks fikih, kata “infak” merujuk pada perbuatan memindahkan sebagian harta milik seseorang kepada orang lain sebagai tanggapan atas perintah agama. seperti fakir miskin, yatim piatu, anggota keluarga, dan lain-lain<sup>7</sup>. Selama ini, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infak adalah harta yang diberikan untuk kepentingan umum oleh seseorang atau badan usaha selain zakat<sup>8</sup>.

Sedekah adalah tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan menerima pahala dari Allah Swt. Pada dasarnya setiap tujuan mulia adalah sedekah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sedekah memiliki arti yang luas, baik untuk hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Sedekah dan infak sering disamakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa sedekah lebih luas daripada infak. Dalam hal ini infak terkait dengan materi, berbeda dengan sedekah bisa materi dan non materi<sup>9</sup>.

Dalam bidang ekonomi, infak dan sedekah merupakan komponen dari zakat. Mereka berpotensi mencegah pengumpulan kekayaan kepada sejumlah kecil orang saja dan memaksa orang kaya untuk menzakatkan kekayaannya dengan sekelompok orang miskin. Maka ZIS juga berperan sebagai sumber harta yang diharapkan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, ZIS memberikan modal kerja kepada masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Abdul Haris Nasution et al., “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>.

<sup>7</sup> Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah And Wakaf As Configuration Of Islamic Pillantrophy,” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2015): 220.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

<sup>9</sup> Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah And Wakaf As Configuration Of Islamic Pillantrophy.”, 2021. 221

<sup>10</sup> Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 340.

Di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian tentang peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan, dan banyak peneliti yang meyakini bahwa zakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Agar peneliti dapat memberikan pernyataan yang relevan dengan menambah peran dari lembaga pengelolanya yaitu BAZNAS agar dapat dilihat perbandingannya, maka kajian dari peneliti sebelumnya, antara lain<sup>11</sup>:

Zaky Ramadhan (2016), dalam penelitiannya mengatakan bahwa peran BAZNAS Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan memang ada, namun tidak signifikan. Dalam realisasinya, program-program yang dimiliki BAZNAS Yogyakarta dikatakan bersifat pasif. Program BAZNAS Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya perhatian aparat pemerintah. Padahal BAZNAS Yogyakarta sendiri merupakan satu-satunya lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah<sup>12</sup>.

Alif Fatul Choriyah dan Sri Abidah Suryaningsih (2022), dalam penelitiannya mengatakan BAZNAS Kota Kediri berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menerapkan teori maqashid syariah melalui program unggulan yaitu program Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Sehat, Kediri Taqwa dan Kediri Makmur<sup>13</sup>.

Masalah kemiskinan juga merembet ke seluruh daerah yang ada di setiap wilayah Indonesia, dan ini bukan hanya masalah nasional tetapi juga masalah di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Kota Kudus merupakan salah satu contoh kota dengan tingkat kemiskinan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Menurut data BPS Kabupaten Kudus angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 64,24 ribu orang meningkat menjadi 67,06 ribu orang pada tahun 2021. Sedangkan akibat membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus berkurang menjadi 66,06 ribu pada tahun 2022.

---

<sup>11</sup> Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.

<sup>12</sup> Zaky Ramadhan, Skripsi "Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 71

<sup>13</sup> Alif Fatul Choriyah, dan Sri Abidah Suryaningsih, "Peran Baznas Kota Kediri Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Miskin," Agustus 2, no. 4 (2022): 469, <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/128>.

Secara demografis dan kultural, kota kudus memiliki potensi utama dalam hal pemerataan pendapatan yaitu ZIS, karena secara keseluruhan sebagian besar penduduk Kudus adalah Muslim dan secara sosial komitmen untuk membayar zakat dan keinginan untuk melakukan infak dan amal telah ditetapkan dalam kecenderungan budaya Islam secara keseluruhan. Bila dilihat persentasenya penduduk kota kudus yang beragama islam mencapai 92,96%<sup>14</sup>. Jika umat Islam mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat dan dana yang terkumpul dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi dan berdampak nyata dalam hal pengentasan kemiskinan.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sebenarnya telah diamanatkan UU No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 3, disebutkan bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. hal ini juga yang dijalankan oleh BAZNAS yang ditunjuk pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan memberikan zakat, infak maupun sedekah dalam hal pembiayaan aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif kepada masyarakat kurang mampu. Sehingga aktivitas ekonomi akan terus berjalan dari hal itu akan terjadi berkurangnya pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang nantinya dapat mengurangi kemiskinan yang ada<sup>15</sup>.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan zakat yang dikelola amil untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat di Kota Kudus cukup besar, Organisasi Amil Zakat Kabupaten Kudus menilai kemungkinan zakat profesi dan infak ASN pada tahun 2022 mencapai Rp 8 miliar setiap tahunnya. Sementara itu, penerimaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2022 berjumlah sekitar Rp 4,1 miliar, termasuk sisa dana ZIS pada tahun 2022<sup>16</sup>.

Tidak mudah membangun sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat, pemerintah dan lembaga harus bersinergi terkait mengelola zakat. Agar peran BAZNAS dalam proses pemberantasan kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah semakin dikenal dan mendapat kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat, maka perlu

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus 2019. 45

<sup>15</sup> Noor Zuhdiyaty, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)," *JIBEKA* 11, no. 2 (2017): 28.

<sup>16</sup> Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

mempertahankan potensi zakat yang ada saat ini dan meningkatkan kesadaran membayar zakat, infak, dan sedekah<sup>17</sup>.

Potensi dan peran BAZNAS dalam mengelola ZIS diharapkan dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan, sehingga harus mendapat perhatian yang besar dan diharapkan zakat, infak, sedekah dapat memiliki sumbangsih kepada masyarakat miskin khususnya yang membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Upaya yang dapat dilaksanakan yaitu dengan mengembangkan potensi zakat, infak, sedekah melalui upaya pinjaman modal usaha, bantuan gerobak, pelatihan keterampilan agar masyarakat miskin memiliki modal berupa keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, dan pendayagunaan zakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa peran BAZNAS Kudus melalui zakat, infak dan sedekah yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan sekali. Jika BAZNAS benar-benar memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Kudus, maka kita harus mendukung penuh semua program dan upaya BAZNAS untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan<sup>18</sup>. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Peran BAZNAS Kudus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat, Infak, Sedekah**”. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan judul yang tertera di atas menggunakan metodologi kualitatif.

## B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembaca untuk memahaminya maka peneliti memfokuskan pada peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah yaitu situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (*activity*) yang berinteraksi secara bersama-sama.

---

<sup>17</sup> Nur Amalia, Skripsi “Peran BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). 4

<sup>18</sup> Muh Ismail S, Skripsi “Peranan BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). 6

### C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, peneliti mengemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kudus dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana dampak pentasyarufan ZIS untuk meminimalisir adanya kemiskinan di Kabupaten Kudus?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah digambarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kudus dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui dampak pentasyarufan ZIS untuk meminimalisir adanya kemiskinan di Kabupaten Kudus

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan bagi ilmu pengetahuan dengan kaitannya dunia pendidikan maupun perekonomian. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian terkait Peran Lembaga ZIS dalam mengentaskan Kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui pentingnya lembaga zakat dalam profesionalisasinya untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah agar bisa berdampak baik kepada kebutuhan dan perekonomian masyarakat (Mustahik). Selain itu penulis juga mengetahui bagaimana pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan.

##### b. Bagi BAZNAS

Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai motivasi dalam operasionalnya dapat optimal dalam melakukan pengelolaan dana zakat dan meningkatkan layanan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan garis besar setiap bagian untuk memudahkan pemahaman isi skripsi. Untuk mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi.

### 2. Bagian Inti

Garis besar dari lima bab termasuk dalam bagian isi. Bab-bab ini terhubung satu sama lain karena mereka membentuk satu kesatuan yang kohesif. Bagian-bagian tersebut membentuk bab yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, fokus penelitian, merumuskan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengembangan deskripsi teori mengenai variabel penelitian yang meliputi: teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab inti yang menjelaskan mengenai deskripsi gambaran objek penelitian, selain itu peneliti juga memaparkan hasil penelitian mulai dari pelaksanaan, penyajian dan analisis data sampai pembahasan. Peneliti juga menjabarkan hasil yang diperoleh dari lapangan baik dari data primer maupun data sekunder hingga proses analisis data menjadi data yang akurat seperti yang diharapkan peneliti.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran yang



berhubungan dengan penelitian, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.

